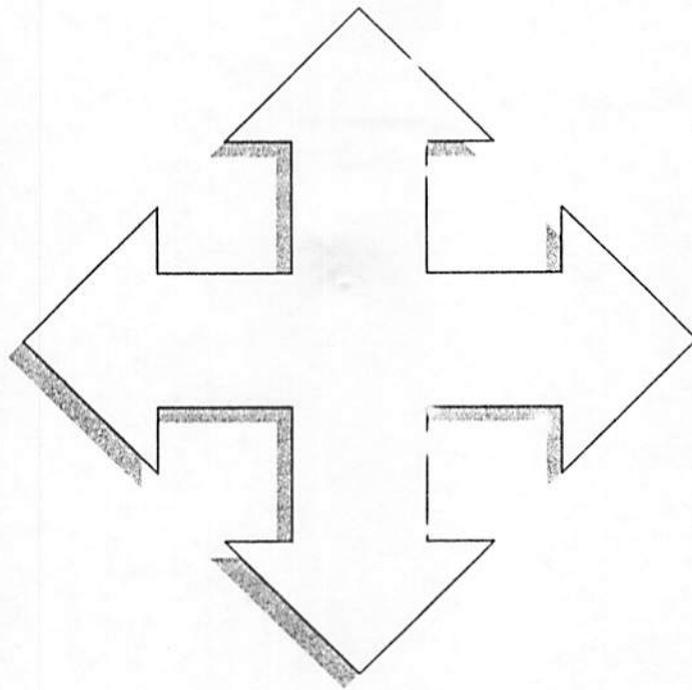


LAPORAN  
AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
( L A K I P )



KECAMATAN LAMONGAN  
KABUPATEN LAMONGAN  
*TAHUN 2011*

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT atas Limpahan Rahmad dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2011 unit kerja Kantor Kecamatan Lamongan dapat diselesaikan.

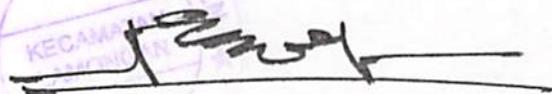
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2011 disusun atas dasar Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Tentang Penerapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagai wujud pertanggungjawaban secara sistematis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIP ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu demi sempurnanya laporan serupa di tahun mendatang sehingga harapan akhir bahwa dengan melihat LAKIP, seseorang atau badan hukum akan dengan mudah mengetahui keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dapat terwujud, kami sangat berterima kasih apabila terdapat saran.

Kami berharap mudah-mudahan Laporan yang sederhana ini ada guna dan manfaatnya, dan akhirnya kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridloi pengabdian kita kepada Bangsa dan Negara, Amien.

Lamongan, Januari 2012

CAMAT LAMONGAN



Drs. M. FAHRUDIN AF, MSi

Pembina

NIP. 19710424 199101 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	!
DAFTAR ISI .....	!!
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
a. Latar Belakang .....	1
b. Tugas Pokok dan Fungsi .....	1
c. Analisa Perkembangan Strategik .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
a. Rencana Strategik .....	8
1. Visi .....	8
2. Misi .....	8
3. Tujuan .....	8
4. Sasaran .....	9
b. Rencana Kinerja .....	9
1. Sasaran dan indikator sasaran .....	9
2. Program .....	10
3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan .....	11
c. Perjanjian Kinerja .....	12
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
a. Pengukuran Kinerja .....	13
b. Evaluasi Kinerja .....	13
c. Analisa Akuntabilitas Kinerja .....	13
d. Akuntabilitas Keuangan .....	16
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>18</b>
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Penyusunan LAKIP merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan Potensi, Peluang dan Kendala yang ada atau mungkin timbul, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Lamongan dan sesuai pula dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan Perangkat sebagai pelaksana teknis kewilayaan yang mempunyai kerja tertentu. Kecamatan Lamongan juga menyusun Rencana Strategis secara sistimatis yang berkelanjutan dari serangkaian rencana kegiatan mendasar dengan tetap memperhatikan potensi, peluang serta kendala yang ada atau mungkin timbul.

Pembentukan organisasi unit kerja Kecamatan Lamongan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan dan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor :49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan. Perencanaan Strategis ini menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan Kecamatan Lamongan yang sesuai dengan tugas dan fungsi bidang masing-masing.

### B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kecamatan Lamongan merupakan salah satu dari 27 (dua puluh tujuh) kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan, bahwa Kecamatan sebagai unsur Staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Kecamatan memiliki fungsi :

1. Pengkoordinasian segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintah yang terpadu ;
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian terhadap kegiatan di bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta ketentraman dan ketertiban ;
3. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan administrasi serta pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah di Kecamatan ;
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan ;
5. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan ;
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan seluruh kegiatan yang diamanatkan sebagaimana telah terangkum dalam tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Kecamatan Sambeng didukung dengan Personil, Sarana dan Prasarana serta Pembiayaan yang masing-masing dapat dijumpai sebagai berikut :

1. PERSONIL :

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Sekretariat Kecamatan Lamongan secara keseluruhan adalah sebanyak 133 ( Seratus Tiga Puluh Tiga ) orang, dengan rincian sebagai berikut :

No	JABATAN	JML	PANGKAT GOL.RUANG	JML	KET
1	Camat	1	Pembina ( IV/a )	1	
2	Sekcam	1	Penata Tk.I ( III/d )	1	
3	Lurah	8	Pembina ( IV/a )	1	
			Penata Tk.(III/d)	4	
			Penata ( III/c )	3	
4	Kasi Kecamatan	3	Penata (III/c)	3	
5	Kepala Sub Bagian	2	Penata (III/c)	2	
6	Sekkel	8	Penata Tk. I (III/d)	2	
			Penata (III/c)	1	
			Penata Muda Tk.I (III/b)	3	
			Penata Muda (III/a)	2	
7	Kasi Kelurahan	29	Pembina (IV/a)	1	
			Penata Tk.I (III/d)	1	
			Penata (III/c)	14	
			Penata Muda Tk.I (III/b)	9	
			Penata Muda (III/a)	4	
8	Sekdes	6	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	3	
			Pengatur Muda (II/a)	2	
			Juru Tk. I (I/d)	1	

9	Staf Kecamatan	23	Penata Muda Tk.I (III/b)	4	
			Penata Muda (III/a)	8	
			Pengatur (II/c)	4	
			Pengatur Muda Tk.I (II/b)	2	
			Pengatur Muda (II/a)	1	
			Juru Tk.I (I/d)	1	
			Juru (I/c)	1	
			Tenaga Kontrak	2	
10	Staf Kelurahan	49	Penata Muda Tk.I (III/b)	10	
			Penata Muda (III/a)	6	
			Pengatur (II/d)	4	
			Pengatur (II/c)	3	
			Pengatur Muda Tk.I (II/b)	10	
			Pengatur Muda (II/a)	3	
			Juru Muda Tk.I (I/b)	2	
			Juru Muda (I/a)	1	
Tenaga Kontrak	10				

## 2. SARANA DAN PRASARANA :

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sarana dan prasarana yang tersedia relatif mencukupi, dengan gambaran sebagai berikut :

- a. Kantor dan Pendopo = 1 (satu) unit dan dalam kondisi baik ;
- b. Rumah Dinas Camat = 1 (satu) unit, kondisi kondisi baik ;
- c. Kendaraan Dinas Camat = 1 (satu) unit, kondisi baik ;
- d. Kendaraan Roda 2 (dua) = 51 (lima Puluh Satu) unit kondisi baik ;
- e. Kendaraan Roda 3 (tiga) = 9 (sembilan) unit, kondisi baik ;
- f. Komputer = 16 (enam Belas) unit kondisi baik , 4 (empat) set dalam kondisi baik, dan 4 (Empat) unit Komputer kondisi rusak ;
- g. Radio HT dan telepon = Masing-masing 1 (satu) unit dalam kondisi baik
- h. Radio HT / RIG = 1 (satu) unit dalam kondisi baik ;

## 3. PEMBIAYAAN :

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lamongan didukung dengan dana operasional dari APBD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 1.814.861.500,- (Satu Milyard Delapan Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) selama 1 (satu) tahun anggaran. Atau setiap satu bulan sebesar Rp. 151.238.458,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh delapan Rupiah), yang pos anggarannya masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) pada Kantor Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.

### C. ANALISA PERKEMBANGAN STRATEGI

Dalam upaya pencapaian tugas pokok dan fungsi di atas terdapat hal-hal yang mendukung dan kemungkinan sebaliknya. Dalam kaitan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

#### 1. KEKUATAN :

- a. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan ;
- b. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat ;
- c. Memberdayakan Perangkat Daerah yang ada di Sekretariat Kecamatan ;
- d. Sarana dan prasarana kerja memenuhi syarat ;
- e. Partisipasi dan peran aktif masyarakat cukup tinggi ;
- f. Terdapatnya Instansi dan UPT Dinas tingkat Kecamatan ;
- g. Tersedianya Unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di semua desa ;

#### 2. KELEMAHAN :

- a. Sumber Daya Perangkat Daerah belum seimbang dengan tuntutan era global dan jumlahnya yang sedikit jika dibandingkan dengan jumlah desa yang ada
- b. Sumber Daya Penyelenggara Pemerintahan Desa relatif rendah ;
- c. Standar mentalitas Pamong Praja belum ada ;
- d. Masih adanya rasa egoisme sektoral Instansi dan UPT Dinas ;
- e. Kesejahteraan PNS dan Unsur Pemerintah Desa perlu ditingkatkan ;
- f. Camat tidak memiliki kewenangan untuk mengambil sanksi terhadap Perangkat Desa.

#### 3. TANTANGAN / ANCAMAN :

- a. Tuntutan masyarakat terhadap kinerja Aparatur penyelenggara Pemerintahan semakin tinggi ;
- b. Penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
- c. Pelayanan Prima ;
- d. Globalisasi .

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEJIK :

##### 1. Visi:

**“ Terwujudnya Aparatur Pemerintahan yang Transparan, Tertib Guna Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat “**

##### Penjelasan VISI :

Dalam rangka untuk mewujudkan peningkatan pelayanan Masyarakat baik dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan pelaksanaan Pembangunan maupun Pembinaan Masyarakat di Kecamatan Lamongan melalui peningkatan Sumber Daya Manusia ( SDM ) Aparatur, peningkatan Sarana dan Prasarana Umum, Peningkatan pemantapan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban, sehingga mampu menumbuh kembangkan seluruh potensi yang ada dan dilaksanakan secara teratur dan terencana.

##### 2. Misi

- a. Meningkatkan Kualitas Aparatur dalam Pelayanan Masyarakat.
- b. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional.
- c. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesehatan dan Pendidikan yang Berkualitas.
- e. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban.

##### 3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan VISI Kantor Kecamatan Lamongan dilakukan upaya-upaya yang pada prinsipnya bertujuan untuk mendapatkan peningkatan pelayanan kepada Masyarakat dan Sasarannya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik, dan sesuai bidang tugas masing-masing yang ada dalam Kecamatan Lamongan yaitu :

- a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi Aparatur di lingkungan Kecamatan sampai di tingkat Desa/Kelurahan.
- b. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional agar melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan fisik jalan maupun balai Desa dan Kantor Kelurahan.
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dan memberikan beras murah yang disubsidi oleh pemerintah bagi keluarga miskin Desa/Kelurahan.
- e. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan secara gotong royong.

#### 4. Sasaran

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan tanggung jawab setiap pekerjaannya.
- b. Meningkatnya sumber daya dan etos kerja Kepala Desa/Kelurahan.
- c. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat dan infra struktur Desa/Kelurahan.
- d. Meningkatnya kesehatan dan pendidikan masyarakat dari keluarga miskin Desa/Kelurahan.
- e. Meningkatnya masyarakat yang memprioritaskan keamanan dan ketertiban lingkungan secara gotong royong.

#### B. RENCANA KINERJA

Merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Unit Kerja Kantor Kecamatan Lamongan melalui kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja dimaksud ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Unit Kerja Kecamatan Lamongan untuk mencapainya dalam tahun 2011. Agar lebih spesifik, dapat dirangkum sebagai berikut :

##### 1. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan tanggung jawab setiap pekerjaannya dengan indikator :
  - 1) Jumlah surat masuk dan keluar yang ditangani ;
  - 2) Jumlah laporan kepegawaian dan laporan barang daerah ;
  - 3) Pembinaan administrasi umum ;
  - 4) Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS ;
  - 5) Administrasi keuangan dan pembayaran gaji serta pertanggung jawabannya
- b. Meningkatnya sumber daya dan etos kerja Kepala Desa/Kelurahan dengan indikator :
  - 1) Jumlah rapat koordinasi dengan Ka.UPT Dinas/Instansi ;
  - 2) Jumlah rapat kerja dengan Kades/Kakel, BPD dan Perangkat Desa ;
  - 3) Intensitas Pembinaan administrasi dan aparat Pemerintahan Desa ;
  - 4) Terselurnya TPAPD bagi Kades dan Perangkat Desa, Tunjangan bagi BPD, tunjangan Asuransi bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan purna bhakti Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
  - 5) Pelayanan administrasi kependudukan, pemerintahan, keagrariaan dan pembinaan kelembagaan di desa ;
  - 6) Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa yang transparan.

c. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat dan infra struktur Desa/Kelurahan, dengan indikator :

- 1) Jumlah Rapat Koordinasi dengan Ka.UPT Dinas dan Kades/Kakel, BPD Tokoh Masyarakat ;
- 2) Frekuensi pengawasan pelaksanaan pembangunan ;
- 3) Frekuensi pelaporan pelaksanaan pembangunan ;
- 4) Terbangunnya sarana dan prasarana fisik desa dari dana APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten ;
- 5) Usulan pembangunan sarana fisik desa dalam menopang kemajuan desa

d. Meningkatnya kesehatan dan pendidikan masyarakat dari keluarga miskin Desa/Kelurahan dengan indikator :

- 1) Frekuensi pemantauan dan pendistribusian RASKIN ;
- 2) Pelayanan Surat permohonan bantuan sarana sosial ;
- 3) Pelayanan dan pemberian bea siswa bagi RTM ;
- 4) Pembinaan kelembayaan sosial di desa ;
- 5) Pengurusan permasalahan sosial di Desa.

e. Meningkatnya masyarakat yang memperdulikan keamanan dan ketertiban lingkungan secara gotong royong, dengan indikator :

- 1) Jumlah pemantauan KAMTIBMAS dengan aparat Keamanan ke desa ;
- 2) Frekuensi inspeksi kepemilikan ijin usaha/HO dan sejenisnya ke perusahaan perusahaan yang ada di Kecamatan Lamongan ;
- 3) Optimalisasi pelunasan pajak dan retribusi daerah ;
- 4) Pemantauan dan pemberian bantuan pertan. terhadap kejadian bencana alam dan gangguan lainnya ;
- 5) Keamanan dan pengamanan kantor dan kunjungan tamu-tamu pemerintahan lainnya serta kegiatan yang diselenggarakan kecamatan ;
- 6) Operasi penegakan Peraturan Daerah.

## 2. PROGRAM :

- a. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
- b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa ;
- c. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan ;
- d. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa ;
- e. Peningkatan sarana prasarana .

### 3. KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN :

- a. **Pengurusan administrasi Ketatausahaan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga ;**
  - 1) Jumlah Surat masuk dan keluar ;
  - 2) Jumlah Laporan Kepegawaian ;
  - 3) Jumlah Barang inventaris Yang dilaporkan ;
  - 4) Jumlah PNS yang naik pangkat dan diusulkan kenaikan pangkatnya ;
  - 5) Administrasi keuangan dan pelayanan gaji dan tunjangan pegawai.
- b. **Pengurusan Pemerintahan Umum dan fasilitasi Pemerintahan Desa :**
  - 1) Rapat koordinasi dengan Instansi / UPT Dinas se Kec. Sambeng ;
  - 2) Rapat kerja dengan Kades/Kakel, Sekdes/Sekkel, Para Kasi dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ;
  - 3) Fasilitasi Penyelesaian Peraturan Desa dan LPJ Kepala Desa ;
  - 4) Fasilitasi penerimaan dan pengadministrasian TPAPD bagi Kades dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD ;
  - 5) Pelaksanaan proses pengangkatan perangkat desa ;
  - 6) Pelayanan administrasi kependudukan, pemerintahan, pembinaan kelembagaan desa dan keagrariaan ;
  - 7) Pengurusan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta keuangan lain dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. **Pengurusan Rapat koordinasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan :**
  - 1) Rapat koordinasi pembangunan dengan instansi / UPT Dinas se Kecamatan ;
  - 2) Jumlah laporan kegiatan pembangunan ;
  - 3) Terbangunnya sarana dan prasarana fisik desa yang bersumber dana dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten ;
  - 4) Usulan pembangunan sarana fisik desa
- d. **Pengurusan dan fasilitasi distribusi RASKIN :**
  - 1) Fasilitasi / pemantauan distribusi beras untuk KK miskin/RASKIN ;
  - 2) Pelaporan penerima RASKIN ;
  - 3) Fasilitasi pendataan masyarakat miskin yang baru bekerja sama dengan BPS ;
  - 4) Pengurusan lembaga sosial dan permasalahan sosial lainnya yang ada di desa.
- e. **Pengurusan pemantauan Situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban maupun penegakan Peraturan Daerah**
  - 1) Jumlah pemantauan KAMTIBMAS dengan aparat Keamanan I 3 desa ;

- 2) Frekuensi inspeksi kepemilikan ijin usaha/HO dan sejenisnya ke perusahaan perusahaan yang ada di Kecamatan Lamongan ;
- 3) Optimalisasi pelunasan pajak dan retribusi daerah ;
- 4) Persiapan dan upaya pertolongan terhadap bencana alam yang ada di desa
- 5) Pengamanan kantor dan tamu penting lainnya ;
- 6) Operasi penegakan perda.

### C. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, bersama ini kami sampaikan suatu Perjanjian Kinerja Kami Melihat Pada Tahun 2011 unit kerja kantor Kecamatan Lamongan telah melakukan dengan berbagai kegiatan sebagai sarana untuk mencapai misi organisasi, namun didalam pelaksanaannya meskipun telah melalui perhitungan dan koordinasi yang cermat serta berkesinambungan masih belum dapat memuaskan semua pihak.

Kiranya dari pengalaman keberhasilan dan kekurangan yang terjadi selama Tahun Anggaran 2011, akan jadikan pemicu untuk berbuat lebih baik dalam Tahun 2012 sehingga tujuan terciptanya good governance dan membangun Lamongan lebih baik dan maju akan terwujud sebagaimana dilihat dalam lampiran.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. PENGUKURAN KINERJA

Dalam pengukuran kinerja dapat dilihat dari dari program yaitu :

1. Peningkatan kualitas administrasi umum kecamatan;
2. Peningkatan administrasi sistem kependudukan dan pelayanan Akte Catatan Sipil, maupun peningkatan kualitas pembinaan kepada unsur Pemerintahan Desa;
3. Peningkatan perencanaan dan pengendalian pembangunan;
4. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat;
5. Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

### B. EVALUASI KINERJA

Untuk mewujudkan peningkatan pelayanan masyarakat baik dibidang penyelenggaraan pemerintahan pembangunan maupun pembinaan masyarakat di Kecamatan Lamongan melalui Sumber Daya Manusia (SDM), mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional agar melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan memberikan pelayanan yang cepat, tepat kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kesehatan, pendidikan yang berkualitas.

### C. ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA :

Adalah digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Instansi Pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Dalam pengukuran Kinerja tidak terlepas dari faktor internal dan faktor eksternal yang ada di Wilayah Kecamatan Lamongan. Faktor internal antara lain meliputi Jumlah, SDM Perangkat Daerah yang ada di Sekretariat Kecamatan Lamongan, sarana dan prasana kerja maupun dukungan dana. Sedangkan faktor eksternal antara lain meliputi Jumlah dan SDM unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa, tuntutan masyarakat maupun era globalisasi.

Analisa capaian kinerja Unit Kerja Kantor Kecamatan Lamongan dalam tahun 2011 secara rinci dapat dilihat pada lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) . .

Dalam melaksanakan kegiatan guna mencapai misi selama tahun 2011, maka dapat dilakukan evaluasi sebagai berikut :

1. Pengurusan administrasi Ketatausahaan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga , dengan indikator meliputi jumlah surat masuk dan keluar, jumlah laporan kepegawaian dan jumlah barang inventaris yang dilaporkan kesemuanya telah dapat dilaksanakan, Pengusulan Kenaikan pangkat bagi PNS telah dilaksanakan sesuai ketentuan/ periodeisasi.
2. Pengurusan Pemerintahan Umum dan fasilitasi Pemerintahan Desa dengan indicator meliputi Rapat koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas / Unit Pelaksana Tehnis se Kecamatan Lamongan, rapat kerja dengan Kepala Desa/Kelurahan, Sekdes/Sekkel, Para Kasi dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), pengurusan masalah kependudukan, administrasi pemerintahan dan keagrariaan serta pembinaan kelembagaan pemerintahan di desa telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat Lamongan Nomor 188/21/Kep/413.301/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Penyelenggaraan Rapat koordinasi Kepala UPT Dinas / Konferensi Tingkat Kecamatan Lamongan dan Konperensi Dinas Kepala Desa/Kelurahan, Sekdes/Sekkel, Kasi Desa/Kelurahan, Kaur Desa, Kasun dan Kades dengan BPD se Kec. Lamongan tahun 2012. Dalam kegiatan ini terdapat 1 (satu) hal seiring dengan era demokratisasi, yakni tingkat kehadirannya tidak bisa maksimal. Upaya yang kami lakukan menghadapi situasi yang demikian adalah mengadakan pemanggilan kepada yang bersangkutan.

Fasilitasi terhadap kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan melakukan pembinaan ke desa. Pemberian petunjuk kepada 12 (dua belas ) Kepala Desa mengenai pengisian register sesuai Tupoksi masing-masing Perangkat Desa, penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2012 dan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban 2011 termasuk fasilitasi pengisian lowongan Jabatan Perangkat Desa dengan tindaklanjut pembentukan Panitia Paneliti dan Penguji Perangkat Desa melalui Keputusan Kepala Desa dalam setiap melakukan pengisiannya, disamping itu terhadap perubahan aturan masalah pemerintahan Desa sebagaimana Undang-Undang 32 Tahun 2004 pemerintah Desa telah membuat aturan penyesuaian jabatan disesuaikan dengan aturan yang saat ini menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Desa.

Selanjutnya terhadap mekanisme pemerintahan desa di Kecamatan Lamongan telah dilaksanakan dengan baik karena semua desa telah mengisi jabatan Perangkat Desa diselenggarakan secara jujur dan adil serta tidak terjadi konflik dalam pelaksanaannya. Selama Tahun 2011 terdapat 3 (tiga) Desa yaitu Desa Rancangkencono, Plosowahyu dan sendangrejo Kecamatan Lamongan telah melaksanakan pengisian dan berhasil mengangkat secara definitif 5 Jabatan Perangkat Desa lainnya yang sebelumnya lowong/kosong sedangkan dalam rencana kegiatan 2012 adalah pemenuhan organisasi dan tata kerja sesuai pola maksimal pemerintahan desa dan pengisian lowongan perangkat desa yang hingga pada

tahun 2011 belum terisi (sesuai Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa).

Pengurusan Rapat koordinasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, dengan indikator meliputi frekuensi rapat koordinasi pembangunan dengan UPT Dinas se Kecamatan Lamongan, jumlah laporan kegiatan pembangunan dan terbangunnya sarana dan prasarana fisik desa yang bersumber dari dana APBN, APBD Propinsi dan APBD Kab. Lamongan serta usulan pembangunan sarana fisik desa, Terhadap kegiatan dimaksud selama Tahun 2011 telah dilaksanakan rapat Koordinasi Perencanaan, Rapat Koordinasi Pelaksanaan, dan rapat koordinasi Pengawasan Pembangunan, maupun rapat koordinasi Evaluasi. Kegiatan rapat / musyawarah telah dapat berjalan dengan baik dan hasilnya secara rutin (selesai rapat) selalu dilaporkan kepada Bupati Lamongan, namun terkadang dari usulan yang diajukan, dimana usulan dimaksud merupakan rekapitulasi usulan dari bawah (Bottom up planning) tidak seluruhnya membuahkan hasil (disetujui). Dalam kaitan ini kami sangat menyadari karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sedangkan terkait dengan pengawasan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fisik desa telah terbangun jalan poros desa dan jembatan sesuai bestek yang ada. Pelaporan juga dilakukan sesuai ketentuan.

3. Pengurusan dan fasilitasi distribusi RASKIN dengan indikator Frekuensi pemantauan distribusi beras untuk KK miskin (RASKIN) dan Pelaporan penerima RASKIN, Terhadap fasilitasi distribusi beras untuk KK miskin (RASKIN) setiap KK mendapat jatah beras tiap bulan sebanyak 15 (Lima belas) Kg telah berjalan dengan baik dan lancar. Adapun jumlah KK katagori miskin penerima beras bersubsidi se Kecamatan selama tahun 2011 adalah 2.413 KK. Dengan demikian jumlah beras yang tersalur di Kecamatan Lamongan adalah sebanyak 31.369 Kg tiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.

Dalam upaya meningkatkan peningkatan fasilitas kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Lamongan utamanya masyarakat kurang mampu pemerintah Kabupaten mengeluarkan kebijaksanaan pengobatan jalan gratis bagi masyarakat Lamongan yang dalam syarat administrasi hanya menunjukkan kartu identitas penduduk (KTP) dan kartu ASKESKIN serta ASKESDA saja sedangkan fasilitas lain bagi masyarakat miskin adalah pemberian Bea siswa bagi warga Miskin sejumlah 30 selama tahun 2011.

4. Pengurusan pemantauan Situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban maupun penegakan Peraturan Daerah, dengan indikator meliputi Jumlah pemantauan KAMTIBMAS dengan aparat Keamanan ke desa, Frekuensi inspeksi kepemilikan ijin usaha/HO dan sejenisnya ke perusahaan perusahaan yang ada di Kecamatan Lamongan dan Optimalisasi pelunasan pajak dan retribusi daerah. Pemantauan situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat telah secara rutin dilakukan ke Desa / Kelurahan se Kecamatan bersama dengan

aparap keamanan (POLSEK dan Koramil) secara sinergi, bantuan pertama terhadap bencana alam atau bencana lainnya, pengamanan kantor dan tamu penting lainnya serta operasi penegakan perda, dalam kaitan ini terdapat satu kendala yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahwa aktifitas penjagaan Keamanan Lingkungan (KAMLING) cenderung menurun. Sedangkan upaya kami adalah tetap menekankan kepada seluruh Kepala Desa / Kelurahan agar pelaksanaan SISKAMSWAKANGSA tetap dilakukan. Sedangkan terhadap upaya pelunasan PBB dari baku tahun 2011 sebesar Rp.1.676.848.923,- (satu milyar enam ratus tuju puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) telah tercapai Rp. 1.676.848.923,- (100 %) kemudian terhadap PAD lainnya berupa Pajak Galian C 2011 untuk Kecamatan Lamongan telah dihapus, Pelaporan dan inventarisasi subyek dan obyek pajak retribusi baru senantiasa kami cukupi sesuai dengan permintaan dan situasi.

Selama Tahun anggaran 2011 dengan program kegiatan dan sasaran yang dilaksanakan dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu organisasi, maka berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada kami telah berupaya semaksimal mungkin guna mewujudkan tercapainya good governance di Unit Kerja Kecamatan Sambeng. Dari upaya-upaya dimaksud kami sangat menyadari belum mampu memuaskan semua pihak. Beberapa kendala yang terjadi sejak tahun 2010 antara lain dapat dirumuskan :

- a. Masih adanya egoisme sektoral UPT. Dinas / Instansi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehingga dari kondisi ini dapat berdampak kepada sinkronisasi tujuan akhir pembangunan ;
- b. Koordinasi yang dilakukan oleh stake holder (kontraktor) berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan masih perlu peningkatan ;
- c. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah yang ada di Sekretariat Kecamatan Lamongan ;
- d. Terbatasnya SDM unsur Pemerintahan Desa / Kelurahan ;
- e. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja unsur Pemerintahan Desa ;
- f. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 belum berjalan secara maksimal.

#### D. AKUNTABILITAS KEUANGAN :

- 1) Dana rutin untuk operasional Unit Kerja Kantor Kecamatan Lamongan selama Tahun Anggaran 2011 adalah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 1.814.861.500,- (Satu Milyar Delapan Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) Penggunaan dana ini senantiasa sesuai dengan ketentuan yang ada baik mengenai pemanfaatannya, maupun pelaporannya. Hal ini kami maksudkan agar akuntabilitasnya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan ;

- 2) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk 12 Desa dan 30 Dusun sebesar Rp. 668.000.000,- dan dari dana tersebut dapat menarik swadaya masyarakat sebesar Rp. 110.000.000,-. Sedangkan pemanfaatannya telah sesuai dengan ketentuan yang ada ;
- 3) Dana lain yang dialokasikan untuk membiayai pembangunan sarana fisik Tahun 2011 di wilayah Kecamatan Lamongan baik dari dana APBD Kabupaten Lamongan, sejumlah Rp. 310.000.000,- , APBD Propinsi Jawa Timur sejumlah Rp. 486.958.000,- dan APBN, sejumlah Rp. 2.100.000.000,-
- 4) Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) sebesar Rp. 655.000.000,- karena kondisi tanah kas Desa di Lamongan termasuk kelas III dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar Rp. 40.000.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan selama tahun 2011, dan untuk perangkat Desa telah tersalurkan kepada yang berhak menerima demikian juga pengadministrasiannya sudah dilaporkan kepada Bapak Bupati Lamongan ;
- 5) Sedangkan program/kegiatan lain yang ditangani oleh Cabang Dinas/UPT, sesuai dengan mekanisme yang ada antara lain melalui rapat dinas dan diskusi selalu ditekankan agar benar-benar dilaksanakan sebagaimana aturan yang ada;
- 6) Untuk pengerjaan fisik proyek bersifat kontraktual, kami hanya memfasilitasi saja, karena kewenangan ada pada pemimpin kegiatan maupun KP-3 ;
- 7) Lebih lengkapnya sebagaimana daftar terlampir.

## BAB IV PENUTUP

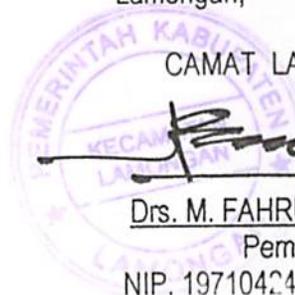
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Lamongan dibuat sebagai pelaksanaan dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1999, yang mengamanatkan setiap Instansi Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya masing-masing dalam rangka mewujudkan terciptanya good governance, diwajibkan membuat laporan akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pejabat yang memberi tugas. Oleh karena itu Pertanggungjawaban yang kami paparkan di depan adalah pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan.

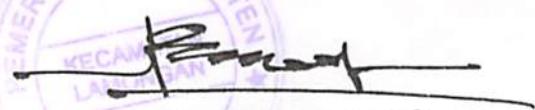
Pada Tahun Anggaran 2011 Unit Kerja Kantor Kecamatan Lamongan telah melakukan berbagai kegiatan sebagai sarana untuk mencapai misi organisasi, namun didalam pelaksanaannya meskipun telah melalui perhitungan dan koordinasi yang cermat serta berkesinambungan masih belum dapat memuskan semua pihak.

Kiranya dari pengalaman keberhasilan dan kekurangan yang terjadi selama Tahun Anggaran 2011, akan kami jadikan pemicu untuk berbuat lebih baik dalam Tahun Anggaran 2012, sehingga tujuan terciptanya good governance dan membangun Lamongan lebih baik dan maju akan terwujud .

Lamongan, Januari i 2012

CAMAT LAMONGAN



  
Drs. M. FAHRUDIN AF, MSi  
Pembina  
NIP. 19710424 199101 1 001

# LAMPIRAN

## RENCANA STRATEGI

Tahun 2010-2015

### FORMULIR RS

Instansi : Kecamatan Lamongan

Visi : Terwujudnya Aparatur Pemerintahan yang Transparan, Tertib Guna Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

- Misi :
- a. Meningkatkan Kualitas Aparatur Dalam Pelayanan Masyarakat ;
  - b. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional ;
  - c. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat ;
  - d. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesehatan dan Pendidikan yang Berkualitas ;
  - e. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban .

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
<p>1. Meningkatkan kualitas Aparatur Dalam Pelayanan Masyarakat ;</p> <p>2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional;</p> <p>3. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat ;</p>	<p>1. Meningkatnya pengelolaan administrasi surat menyurat lingkup Kecamatan Lamongan;</p> <p>2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan rapat kerja dengan UPT dinas/instansi tingkat Kecamatan dan pelaksanaan rapat kerja Kades/ Lurah, Sekdes/Sekkei, Para Kasi, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)</p> <p>3. Meningkatnya efektifitas perencanaan dan pengendalian maupun evaluasi pembangunan di Kecamatan Lamongan ;</p>	<p>a. Jumlah surat masuk dan keluar yg ditangani;</p> <p>b. Jumlah laporan kepegawaian ;</p> <p>c. Pembinaan administrasi umum;</p> <p>d. Pengusulan kenaikan pangkat PNS.</p> <p>a. Jumlah rapat koordinasi dengan Ka.UPT Dinas/ Instansi ;</p> <p>b. Jumlah Raker dengan Kades/Lurah, Sekdes/Sekkei, Para Kasi, BPD dan Perangkat Desa ;</p> <p>c. Intensitas pembinaan administrasi Pemerintahan Desa;</p> <p>d. Tersalurnya TPAPD bagi Kades &amp; Perangkat Desa serta tersalurnya tunjangan bagi BPD</p> <p>a. Jumlah Rapat koordinasi dengan Ka.UPT Dinas/Instansi dan Kades, BPD Tokoh masyarakat ;</p> <p>b. Frekuensi pengawasan pelaksanaan pembangunan ;</p> <p>c. Frekuensi pelaporan pelaksanaan pembangunan ;</p> <p>e. Terbangunnya sarana &amp; prasarana fisik desa dari dana APBN, APBD I &amp; APBD II .</p>	<p>Mengupayakan peningkatan pelayanan mutu administrasi umum, Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa, Perekonomian dan Pembangunan, Kesejahteraan Sosial Masyarakat serta Ketentraman dan Ketertiban masyarakat di Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.</p>	<p>1. Pelayanan administrasi kesekretariatan ;</p> <p>2. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa serta fasilitasi pendistribusian TPAPD bagi Kades &amp; Perangkat Desa serta Tunjangan bagi BPD ;</p> <p>3. Pelaksanaan dan pengadministrasian rapat koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta fasilitasi dan monitoring pelaksanaan proyek masuk desa;</p>	<p>Penyusunan RENSTRA Kecamatan Lamongan Tahun 2010-2015 mengacu pada LAKIP Kecamatan Lamongan Tahun 2010, dan sudah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Menurunnya masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dan meningkatnya kesejahteraan warga miskin.	a. Terselenggaranya distribusi RASKIN ; b. Fasilitasi pendataan masyarakat penerima JAMKESMAS c. Fasilitasi Pemberian bea siswa	Semua KK miskin S d a Masy peneri ma	4. Pelaksanaan dan pengadministrasian distribusi Raskin, pemberian bea siswa dan kartu JAMKESMAS	4. Pengurusan dan fasilitasi distribusi RASKIN sarta PKPSBBM.	Input : Dana : SDM : Out Put 1. Fasilitasi distribusi RASKIN 2. Pelaporan penerimaan RASKIN 3. Pemberian bea siswa  4. PKPS BBM	Rupiah Orang  Kg Kali Penerima  KK Miskin	20.000.000. 2  31.369/bulan 12 30  2.413	12 bulan
5. Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat .	a. Terselenggaranya jaga Pos Kamling di semua desa sampai tingkat RT ; b. Jumlah laporan situasi dan kondisi Kecamatan : c. Monitoring situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban di semua desa ; d. Penegakan Peraturan Daerah dan pelunasan Pajak dan retribusi daerah e. Pengawasan distribusi pupuk	12 kali  12 kali  12 kali  P3B lunas sebelum setiap tempo saat	5. Pemantauan situ-asi dan kondisi ketentraman dan ketertiban Kecamatan maupun pelaksanaan Penegakan Perda Daerah.	5. Pengurusan pemantauan Situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban maupun penegakan Peraturan Daerah.	Input : Dana : SDM : Out Put 1. Jumlah pemantauan KAMTIBMAS dengan aparat Keamanan ke Desa ; 2. Frekuensi inspeksi kepemilikan Ijin usaha/HO dan sejenisnya ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kecamatan Sambeng ; 3. Optimalisasi pelunasan pajak dan retribusi daerah 4. Pemantauan dan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi	Rupiah Orang  Kali  Kali  Rupiah  Kali	20.000.000. 4  24  105  1.676.248.923,-  Setiap ada pengiriman	

# RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2010-2015

Instansi : kecamatan Lamongan

FORMULIR RKT

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KET
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Meningkatnya pengelolaan administrasi surat menyurat lingkup Kecamatan Lamongan ;	a. Jumlah surat masuk dan keluar yang ditangani ; b. Jumlah laporan kepegawaian ; c. Pembinaan administrasi umum ; d. Pemrosesan kenaikan Gaji Berkala e. Pemrosesan Kenaikan Pangkat	2.721 srt 120 srt 12 kali 24 orang 39 Orang	1. Pelayanan administrasi ke sekretariat ;	1. Pengurusan Adm.ke-TU-an, Kepegawaian, perlengkapan dan Rumah Tangga ;	Input : Dana : SDM : Out Put : 1. Jumlah surat masuk dan keluar 2. Jumlah Laporan kepegawaian ; 3. Jumlah laporan barang Inv. 4. Proses gaji berkala 5. Proses Kenaikan Pangkat	Rupiah Orang surat Kali Jenis Orang Orang Rupiah Orang	10.000.000,- 2 2721 12 4 24 39 40.000.000,- 3	
2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan rapat kerja dengan dinas/instansi dan UPT tingkat Kecamatan dan pelaksanaan rapat kerja Kades/Lurah, Sekdes/Sekkel, Para Kasi, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	a. Jumlah rapat koordinasi dengan Ka.UPT Dinas/Instansi ; b. Jumlah raker dengan Kades, Kakel, Sekdes/Sekkel, Para Kasi, BPD dan Perangkat Desa ; c. Intensitas pembinaan administrasi Pemerintahan Desa ; d. Tersalurnya TPAPD bagi Kades & Perangkat Desa serta tunjangan Anggota BPD .	12 kali 12 kali 12 kali semua Kades & Anggota BPD	2. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan umum dan Desa serta fasilitasi distribusi T. PU Kades & Perangkat Desa serta tunjangan bagi BPD ;	2. Pengurusan Pemerintahan Umum dan fasilitasi Pemerintahan Desa ;	Input : Dana : SDM : Out Put 1. Rapat koordinasi dengan UPT Dinas/Instansi se Kec ; 2. Raker dengan Kades/Kakel, Sekdes/Sekkel, Para Kasi, Perangkat Desa dan BPD serta LPM ; 3. Fasilitasi Penyelesaian Perdes dan LPJ Kades ; 4. Fasilitasi penerimaan TPAPD bagi Kades & Perangkat Desa serta Tunjangan BPD .	Kali Kali Kali Buku Rupiah Rupiah	12 12 12 24 655.000.000,- 40.000.000,-	
3. Meningkatnya efektifitas perencanaan dan pengendalian maupun evaluasi pembangunan di Kecamatan Lamongan ;	a. Jumlah rapat koordinasi dengan Ka.UPT Dinas/Instansi dan Kades, BPD, Tokoh Masyarakat ; b. Frekuensi pengawasan pelaksanaan pembangunan ; c. Frekuensi pelaporan dan pelaksanaan pembangunan ; d. Terbangunnya sarana dan prasarana fisik desa dari dana APBN, APBD Prop. & APBD Kabupaten ;	3 kali 6 kali 12 kali semua desa	3. Pelaksanaan dan pengadministrasian rapat Koordinasi Perencanaan, Pelaksanan dan pengawasan pembangunan serta fasilitasi & monitoring proyek masuk desa ;	3. Pengurusan rapat koordinasi dan rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan ;	Input : Dana : SDM : Out Put 1. Rapat koordinasi Pembangunan dengan UPT Dinas/Instansi se Kec ; 2. Jumlah laporan kegiatan Pembangunan ; 3. Fasilitasi penerimaan Dana ADD dan Bansun 4. Monitoring pelaksanaan proyek sistem swakelola dan kontraktual	Rupiah Orang Kali Kali Rupiah Kali	30.000.000,- 2 6 12 668.000.000,- PM	

1	2	3	4	5	6
<p>4. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesehatan Pendidikan dan Berkualitas ;</p> <p>5. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan dan Keterlibatan.</p>	<p>4. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesehatan dan Pendidikan yang Berkualitas ;</p> <p>5. Meningkatkan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat.</p>	<p>a. Terselenggaranya distribusi Rasidin ;</p> <p>b. Fasilitas pendataan Masyarakat Penerima JAMKESMAS</p> <p>c. Fasilitas Pemberian bea siswa</p> <p>a. Terselenggaranya Jaga Pos Kampung di semua Desa sampai tingkat RT;</p> <p>b. Jumlah laporan situasi dan kondisi Kecamatan ;</p> <p>c. Monitoring situasi dan kondisi ketentraman dan keterlibatan di semua desa ;</p> <p>d. Penegakan Peraturan Daerah dan pelaksanaan pajak dan retribusi daerah.</p> <p>e. Pentaun penyaluran Pupuk Bersubsidi</p>		<p>4. Pelaksanaan dan pengad- ministrasian serta monitoring distribusi Rasidin, Jamkesmas, dan Pemberian bea siswa</p> <p>5. Pemanfaatan situasi dan kondisi ketentraman dan keterlibatan Kecamatan maupun pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah.</p>	

**LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011-2015  
KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN**

NO	PROGRAM UTAMA	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUT PUT		INDIKATOR KINERJA OUT COME		ANGGARAN
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1. Peningkatan peran serta Kepemudaan	Pemuda di 20 Desa/Kelurahan.	Terlaksananya pembinaan Organisasi Kepemudaan di Kecamatan Lamongan.	90 %	Meningkatnya peran serta Kepemudaan di Kec. Lamongan	90 %	Rp. 3.600.000,-
2.	BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI. 1. Peningkatan dan Kenyamanan Lingkungan.	20 Desa/Kelurahan di Wilayah Kecamatan Lamongan.	Terlaksananya pengendalian keamanan dan lingkungan.	85 %	Tercapainya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	85 %	Rp. 108.120.000,-
3.	BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN.						
	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kantor Kecamatan Lamongan.	Terbayarnya tagihan jasa komunikasi, Sumberdaya air, dan Listrik.	100%	Terbayarnya tagihan jasa komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik tepat waktu.	100%	Rp. 28.200.000,-
	2. Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Kegiatan pelayanan Administrasi Kantor Kecamatan Lamongan.	Adanya perawatan dan perlengkapan Kantor serta jasa servis yang dilakukan.	100 %	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor yang dapat beroperasi dengan baik.	100 %	Rp. 60.000.000,-
	3. Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Kegiatan pelayanan Administrasi Kantor Kecamatan Lamongan	Terbitnya STNK Kendaraan Dinas Roda 4.	100 %	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.	100 %	Rp. 1.000.000,-
	4. Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Kegiatan Administrasi Keuangan	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100 %	Tercapainya kualitas pelayanan administrasi Keuangan.	100 %	Rp. 48.000.000,-
	5. Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Kegiatan Administrasi Perkantoran.	Penyediaan ATK.	100 %	Terpenuhinya ATK.	100 %	Rp. 259.468.000,-
	6. Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Kebutuhan Barang Cetak dan penggandaan di Kantor Kec.	Barang Cetakan dan penggandaan kebutuhan Kantor	100 %	Terpenuhinya kebutuhan barang Cetakan dan penggandaan di Kantor.	100 %	Rp. 54.558.000,-
	7. Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Penyediaan komponen instalasi Listrik di Kecamatan.	Komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan Kantor.	100 %	Terpenuhinya komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor.	100 %	Rp. 12.600.000,-
	8. Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Peningkatan SDM dan Wawasan Aparatur.	Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	100 %	Terpenuhinya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.	100 %	Rp. 27.996.000,-

1	2	3	4	5	6	7	8
	9. Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Kegiatan Rapat-rapat dinas.	Makanan dan Minuman rapat.	100 %	Terpenuhinya makanan dan minuman rapat.	100 %	Rp. 131.820.000,-
	10. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jasa tenaga Administrasi teknis/kegiatan.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis kegiatan	100 %	Meningkatnya pelayanan Jasa Administrasi Teknis/ Kegiatan.	100 %	Rp. 115.597.000,-
	11. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Peralatan Gedung Kantor.	Komputer dan Printer.	100 %	Terlaksananya Tugas-tugas Administrasi Perkantoran.	100 %	Rp. 7.500.000,-
	12. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Gedung Kantor.	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	100 %	Terjaganya kualitas bangunan Kantor.	100 %	Rp. 95.000.000,-
	13. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Kendaraan dinas/ operasional.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas/operasional.	100 %	Terjaganya kondisi yang Laik jalan untuk kendaraan dinas/operasional.	100 %	Rp. 17.402.000,-
	14. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	100 %	Terjaganya kualitas bangunan sedang Kantor	100 %	Rp. ,-
	15. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Gedung Kantor.	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD.	100 %	Terselenggaranya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	95 %	Rp. 5.000.000,-
	16. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Gedung Kantor	Laporan Keuangan Semesteran.	100 %	Terselenggaranya laporan keuangan semesteran yang tepat waktu.	100 %	Rp. 5.000.000,-
	17. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Pelaksana/ Pengguna Anggaran.	Laporan Keuangan Akhir Tahun.	100 %	Terselenggaranya laporan keuangan akhir tahun yang tepat waktu.	100 %	Rp. 5.000.000,-
4.	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b> 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.	Pelaksana/ Pengguna Anggaran.	Adanya partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan	100 %	Adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/Kelurahan.	100 %	Rp. 829.000.000,-

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN**

Tahun 2010-2015

Instansi : Kecamatan Lamongan

Formulir PKK

PROGRAM	KEGIATAN					PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET	
	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Pelayanan administrasi kesekretariatan ;	1. Pengurus adm Ke-TU-an, Kepegawaian, Perfengkapan & Rumah Tangga ;	Input :						
		Dana :	Rupiah	10.000.000	10.000.000	100 %		
		SDM	Orang	2	2	100 %		
		Output :						
		1. Jumlah surat masuk dan keluar ;	Surat	2.721	2.721	100 %		
	2. Pelaksanaan, koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa ;	2. Pengurusan Pemerintahan Umum dan fasilitasi Pemerintahan Desa ;	2. Jumlah Laporan kepegawaian ;	Kali	12	12	100 %	
			3. Jumlah laporan barang Inventaris ;	Jenis	4	4	100 %	
			4. Pemrosesan gaji berkala	Orang	24	24	100 %	
			5. Pemrosesan Kenaikan Pangkat	Orang	39	39	100 %	
			Input :	Rupiah	40.000.0000	40.000.0000	100 %	
3. Pelaksanaan dan pengadministrasian rapat koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan ;		3. Pengurusan rapat koordinasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan ;	Dana :	Orang	3	3	100 %	
			SDM				100 %	
			Output :	Kali	12	12	100 %	
			1. Rapat koordinasi dengan Cab.Din/UPT se Kecamatan ;	Kali	12	12	100 %	
			2. Raker dengan Kades/Kakel Sekdes/Sekkel Para Kasi, Perangkat Desa dan BPD serta LPM ;				100 %	
3. Pelaksanaan dan pengadministrasian rapat koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan ;	3. Pengurusan rapat koordinasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan ;	3. Penyelesaian perdes dan LPJ Kades ;	Buku	24	24	100 %		
		4. Fasilitasi penerimaan TPAPD dan Tunjangan BPD	Rupiah	534.000.000,- 40.000.000,-	655.000.000,- 40.000.000,-	100 %		
		Input :	Rupiah			100 %		
		Dana :	Orang	30.000.000	30.000.000	100 %		
		SDM		2	2	100 %		
	3. Pelaksanaan dan pengadministrasian rapat koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan ;	3. Pengurusan rapat koordinasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan ;	Output :	Kali	6	6	100 %	
			1. Rapat koordinasi pembangunan dengan Cab.Din/UPT se kecamatan ;	Kali	12	12	100 %	
			2. Jumlah laporan kegiatan pembangunan ;	Rupiah	668.000.000,-	668.000.000,-	100 %	
			3. Fasilitasi & monitoring pelaksanaan proyek bantuan ADD dan Bansun;				PM	
			4. Monitoring pelaksanaan proyek sistem swakelola dan kontraktual	Kali	PM	PM	PM	

1	2	3	4	5	6	7	8
4. Pelaksanaan dan Pengadministrasian distribusi untuk KK miskin maupun pelayanan ASKESKIN ;	4. Pengrusab dan fasilitasi distribusi RASKIN serta Pelayanan ASKESKIN ;	Input : Dana : SDM Output : 1. Fasilitasi distribusi RASKIN ; 2. Pelaporan penerima RASKIN ; 3. Penerima bea siswa	Rupiah Orang	20.000.000 2	20.000.000 2	100 % 100 %	
5. Pemantauan Situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban kecamatan maupun pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah.	5. Pengurusan pemantauan situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban maupun penegakan Peraturan Daerah.	4. PKPS BBM  Input : Dana : SDM Output : 1. Jumlah pemantauan KAMTIBMAS dengan aparat keamanan ke desa ; 2. Frekuensi inspeksi ijin usaha/HO dan sejenisnya ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kecamatan Lamongan ; 3. Optimalisasi pelunasan pajak dan retribusi daerah. 4. Pemantauan dan pengawasan distribusi pupuk	Rupiah Orang  Kali Kali Rupiah Kali	2.413  20.000.000,- 4  24 105 1.676.848.923,- Tiap ada pengiriman pupuk	2.413  20.000.000,- 4  24 105 1.676.848.923,- Tiap ada pengiriman pupuk	100 % 100 %  100 % 100 % 100 % 100 %	

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN**  
Tahun 2010-2015

Instansi : Kecamatan Lamongan

Formulir PPS

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6
<p>1. Terwujudnya tertib administrasi umum di Sekretariat Kecamatan Lamongan ;</p> <p>2. Terciptanya koordinasi yang baik dengan Instansi dan pelaksana terkait maupun dengan unsur Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan semua kegiatan ;</p> <p>3. terselenggaranya koordinasi pembangunan secara konsisten guna peningkatan perekonomian masyarakat ;</p> <p>4. Terdapatnya koordinasi peningkatan kesejahteraan masyarakat ;</p> <p>5. Tercapainya peningkatan ketentraman dan ketertiban.</p>	a. Jumlah surat masuk dan keluar yang ditangani ;	2.721 srt	2.721 srt	100 %	
	b. Jumlah laporan kepegawaian ;	36 jenis srt	36 jenis srt	100 %	
	c. Pembinaan administrasi umum ;	12 kali	12 kali	100 %	
	d. Pemrosesan kenaikan gaji berkala.	24 orang	24 orang	100 %	
	e. Pemrosesan Kenaikan Pangkat	39 Orang	39 Orang	100 %	
	a. Jumlah rapat koordinasi dengan Kacabdin/Instansi	12 kali	12 kali	100 %	
	b. Jumlah raker dengan Kades, BPD dan Perangkat Desa ;	12 kali	12 kali	100 %	
	c. Intensitas Pembinaan administrsai Pemerintahan Desa ;	12 kali	12 kali	100 %	
	d. Tersalurnya TPAPD bagi Kades & Perangkat Desa dan Anggota BPD	semua kades & RD serta BPD	semua	100 %	
	a. Jumlah rapat Koordinasi dengan Kacabdir/UPT dan Kades, BPD Tokoh Masyarakat ;	3 kali	3 kali	100 %	
	b. Freskuensi pengawasan pelaksanaan pembangunan	6 kali	6 kali	100 %	
	c. Frekuensi pelaporan pelaksanaan pembangunan ;	12 kali	12 kali	100 %	
	d. Terbangunnya sarana & prasarana fisik desa dari dana APBN, APBD Prop dan APBD Kab.	semua desa	PM	PM	
	a. Tersalurnya distribusi RASKIN, Kartu JAMKESMAS	KK miskin	kk miskin	100 %	
	b. Penerima Bea siswa	30 orang	kk Penerima	100 %	
	a. Terselenggaranya jaga pos kamling di semua desa sampai tingkat RT ;	12 kali	12 kali	100 %	
	b. Jumlah laporan situasi dan kondisi kecamatan ;	12 kali	12 kali	100 %	
	c. Monitoring situasi & kondisi ketentraman & ketertiban di semua desa ;	12 kali	12 kali	100 %	
	d. Penegakan Peraturan Daerah dan pelunasan pajak dan retribusi daerah .	PBB lunas sbi jatuh tempo	PBB lunas	100 %	